



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Jl. Cimuncang No. 21D Bandung
Jawa Barat

<https://pt-bandung.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode: 1 Juli 2026 s/d 30 September 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS BERJALAN

4,00 / 99,98 %

JUMLAH 417 RESPONDEN

GENDER Laki-Laki : **310** org

Perempuan : **107** org

PENDIDIKAN Tidak/Belum Sekolah : **0** org

Diploma 2 : **1** org

SD : **0** org

Diploma 3 : **5** org

SMP : **1** org

Sarjana S1 : **317** org

SMU : **4** org

Magister S2 : **84** org

Diploma 1 : **0** org

Doktor S3 : **5** org

PEKERJAAN PNS : **2** org

Wiraswasta : **172** org

TNI : **0** org

Wirausaha : **36** org

Polri : **8** org

Tenaga Kontrak : **3** org

Lainnya : **196** org

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Rata-Rata per Unsur:

1. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? **3.99**
2. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ? **4.00**
3. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? **4.00**

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah:

1. **Menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?**

Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media informasi mengenai jenis layanan yang tersedia di Pengadilan Tinggi Bandung beserta besaran biaya atau tarif resmi yang berlaku. Selain itu, meningkatkan publikasi informasi terkait jenis layanan dan tarif resmi melalui brosur pada meja layanan, penayangan informasi pada layar informasi, serta melalui situs web dan media sosial resmi Pengadilan Tinggi Bandung. Informasi tersebut juga mencakup pentingnya penerimaan bukti transaksi keuangan atau pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan.

2. **Pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?**

Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme dan prosedur pengurusan perkara melalui jalur pelayanan resmi Pengadilan. Sosialisasi ini juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai batasan interaksi dengan Hakim, Panitera, dan staf Pengadilan di luar persidangan serta mendorong masyarakat untuk menggunakan kanal pelayanan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. **Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?**

Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai komitmen Pengadilan Tinggi Bandung dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik percaloan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media informasi, disertai penyampaian informasi mengenai saluran pengaduan resmi yang dapat digunakan masyarakat apabila menemukan atau mengetahui dugaan praktik percaloan. Selain itu, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan guna mencegah dan menindaklanjuti dugaan praktik percaloan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

* Terima kasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki kualitas pelayanan.



14 Oktober 2026

Ketua Pengadilan

Dr. Bayu Supriyono, S.H., M.Hum.